



# Rencana Kerja Tahun 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung



Menuju Lampung Maju dan Sejahtera

## KATA PENGANTAR

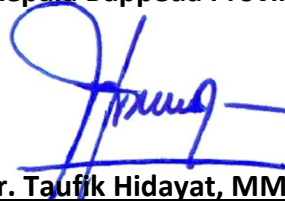
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan Rencana Program/ Kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016 dengan indikator kinerja yang akan dicapai dan perkiraan maju tahun 2017. Dokumen Renja Bappeda Tahun 2016 akan ditindaklanjuti dalam penyusunan KUA/ PPAS dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

**Bandar Lampung, April 2015**  
**Kepala Bappeda Provinsi Lampung,**



**Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19601009 198603 1 011**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Tahun 2015 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ketiga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 telah disusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 rencana alokasi anggaran Program Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 yang merupakan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.700.000.000,-. Yang terdiri dari 11 Program dan 92 kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut Bappeda Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera”.

*Bandar Lampung, April 2015*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2014) DAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2014 .....	4
2.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	5
2.1.2 Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/Capaian Kinerja .....	6
2.1.3 Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung.....	24
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung.....	28
3.2 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016.....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
a. Matrik Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target & realisasi IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014...	5-6
Tabel 2.2 Capaian Akuntabilitas Program Kegiatan/ Capaian Kinerja.....	6-17
Tabel 2.3 Program, kegiatan, pagu realisasi Belanja langsung TA 2014.....	18-23
Tabel 2.4 Pagu & realisasi belanja tidak langsung TA. 2014.....	23-24
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan & Sasaran Jangka menengah.....	28-29
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019.....	30-31
Tabel 3.3 Program & Indikator Kinerja Program Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019.....	32-32
Tabel 3.4 Program & Kegiatan Bappeda Tahun 2016.....	33-38

## ***BAB I. PENDAHULUAN***

---

### **1.1. Latar Belakang**

Urusan pemerintahan dalam suatu daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam amanat peraturan tersebut, pembagian urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi penunjang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kelancaran pada tatalaksana pemerintahan daerah.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut, diperlukan rencana kerja yang sistematis dan sesuai dengan arahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Strategis Bappeda 2015-2019.

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014:
9. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung untuk periode Tahun Anggaran 2016 yang dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Lampung adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun KUA PPAS dan RKA Bappeda Tahun 2016.
2. Menjamin berkesinambungan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Bappeda Provinsi Lampung terutama dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kepentingan kebutuhan sarana dan prasarana SDM yang berkompeten.

3. Tercapainya sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Lampung yang profesional dengan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana untuk kelancaran dan efektifitas ketatalaksanaan tugas-tugas Bappeda

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyajian Rancangan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

##### ***Bab I. Pendahuluan***

---

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

##### ***Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun lalu ( Tahun 2014) dan tahun berjalan (Tahun 2015)***

---

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### ***Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan***

---

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Lampung dan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

##### ***Bab IV. Penutup***

---

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

##### ***Lampiran***

---

Menguraikan beberapa lampiran pendukung Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.



## ***BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2014) dan Tahun berjalan (tahun 2015)***

---

Sesuai dengan amanat *Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi terhadap target yang telah dibuat dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok yang diemban.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang tercapai dan belum tercapai baik secara makro maupun lingkup instansi. Pelaksanaan evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2015 secara makro bercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, serta secara mikro adalah hasil kerja dari Renja tersebut. Bappeda Provinsi Lampung berupaya secara optimal menjalankan program-program Pemerintah, namun tentunya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait pencapaian target dimaksud.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2014**

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015, akan diuraikan 3 pokok realisasi capaian kerja yaitu realisasi capaian indikator kinerja utama, realisasi capaian program dan kegiatan/ capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan/ serapan anggaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Lampung sangat berkaitan dengan Renstra Bappeda Provinsi Lampung. Setiap kajian evaluasi Renja Tahunan Bappeda merupakan bagian dari capaian Renstra Bappeda yang mencakup rencana pembangunan lima tahunan (Repelita).

### 2.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2009-2014, dapat diketahui indikator kinerja utama Tahun 2014 sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Target dan Realisasi IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1. Terwujudnya rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas.	1. RPJMD 2010-2014 dan RKPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur	100	95
	2. Kesesuaian antara muatan rancangan RPJMD dengan RPJPD	100	100
	3. Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi dan program Gubernur terpilih.		
	4. Kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD	100	100
	5. Kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMD	100	100
	6. Kesesuaian rancangan renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RKPD	100	100
	7. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMD	100	100
	8. Pendapat stakeholder tentang dokumen penyusunan RPJMD	Baik	Baik (100%)
	9. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKPD	Baik	Baik (100%)
	10. Pendapat stakeholders tentang dokumen penyusunan RKPD	Baik	Baik (100%)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Gubernur/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan daerah	Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah Gubernur	90	90
3. Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan reformasi birokrasi Bappeda melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia</li> <li>• Tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan Bappeda</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mitra kerja, baik di pusat maupun di Daerah</li> </ul>	100  baik  baik	100  baik (100%)  baik (100%)
4. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bappeda	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Bappeda	100	95
5. Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar penilaian good governance</li> <li>• Standar penilaian AKIP</li> </ul>	baik  baik	baik (100%)

### 2.1.2. Capaian Akuntabilitas Program dan Kegiatan/ Capaian Kinerja

Akuntabilitas program dan kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung merupakan rincian analisis capaian program dan kegiatan secara akumulatif dari seluruh kegiatan pada masing-masing program yang dilaksanakan pada Tahun 2014. Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, dengan rincian program dapat diuraikan dalam Tabel 2.2. pada halaman berikut.**

**Tabel 2.2 Capaian Akuntabilitas Program Kegiatan/ Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana	Tingkat pemenuhan kebutuhan layanan telpon, internet, air, dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100%	100%	100%
prasarana yang memadai	Jumlah layanan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	Penyed. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	1 orang	1 orang	100%
	persentase peningkatan layanan pengelolaan keuangan	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen aset	Penata Usahaan Aset Daerah	1 dok.	1 dok.	100%
	Jumlah peningkatan layanan kantor Bappeda	Dukungan Operasional Kantor Bappeda	1 paket	1 paket	100%

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana prasarana yang memadai	Jumlah kendaraan dinas roda 4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 unit kend. roda 4	3 unit kend. roda 4	100%
	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
	jumlah peningkatan sarana kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	10 kend. roda 2	10 kend. roda 2	100%	
			5 kend. roda 4	5 kend. roda 4		
	Jumlah Kalender Kegiatan Tahunan dan Buku Agenda 1 paket	Pembuatan Kalender Kegiatan Tahunan dan Buku Agenda	1 paket	1 paket	100%	

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana prasarana yang memadai	Jumlah Pakaian Olahraga	Pengadaan Pakaian Olahraga	1 paket	1 paket	100%	

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana prasarana yang memadai	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bappeda	75 orang	75 orang	100%	
Terlaksananya senam kesegaran jasmani dan ceramah agama	Jumlah penyelenggaraan senam jasmani ceramah agama	Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Perencana	36 kali senam 48 kali ceramah	36 kali senam 48 kali ceramah	100%	

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA) 2013	1 Dok. Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2013	1 Dok. Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2013	100%
			1 Dok. LPPD & LKPJ 2013	1 Dok. LPPD & LKPJ 2013	100%
			1 Dok. Kinerja APBD 2014	1 Dok. Kinerja APBD 2014	100%

**6. Program Perencanaan Tata Ruang telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis	Jumlah dokumen pelaksanaan program PPSP/AMPL Prov. Lampung	Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Dok. PPSP/ AMPL dan Road-map sanitasi	1 Dok. PPSP/ AMPL dan Road-map sanitasi	100%
			1 Dok. Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dok. Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%
			1 prosee-ding Perda Lpg	1 prosee-ding Perda Lpg	100%
			1 Dok. Perencanaan Model Infrastruktur Hijau di Kotabaru Lampung	1 Dok. Perencanaan Model Infrastruktur Hijau di Kotabaru Lampung	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
	Dokumen Laporan Rencana Detail Kawasan Destinasi Wisata Pantai Barat Lampung	Penyusunan RTBL Kawasan Pariwisata Pesisir Barat Lampung	1 Dok.	1 Dok.	100%

**7. Program Pengembangan Data/ Informasi telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
				Kegiatan	%
Tersedianya data dan informasi yang lengkap akurat dan aktual	Jumlah peningkatan database metadata spasial	Pembangunan Database Metadata Spasial	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah peningkatan layanan website Bappeda	Pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola data spasial	20 orang	20 orang	100%
	Jumlah dokumen peta tematik	Pembuatan Peta Tematik	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah dokumen peta administrasi Lampung	Pembuatan Peta Administrasi Lampung	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah peningkatan layanan perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah dokumen HSPK dan Display Data pembangunan	Penyusunan Data Pembangunan dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Display Data Pembangunan	1 paket dok HSPK	1 paket dok HSPK	100%
			1 paket Dok. LDA	1 paket Dok. LDA	
			1 paket dok. display data pemb.	1 paket dok. display data pemb.	
	Jumlah dokumen profil Lampung	Penyusunan Bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	1 paket buku profil Lpg	1 paket buku profil Lpg	100%
1 paket profil Lpg			1 paket film profil Lpg	100%	

**8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 93,81%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		%
				Kegiatan		
Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan	Jumlah peserta Forgab & Musrenbang	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	15 Kab/kota 50 SKPD	15 Kab/kota 50 SKPD	15 Kab/kota 50 SKPD	100%
	Jumlah dokumen RKPD	Penyusunan RKPD 2014	90 Dok. RKPD	90 dok RKPD	90 dok RKPD	100%
	Jumlah dokumen Musrenbangnas	Musrenbang Nasional	1 Dok. Musren Bang Nas	1 Dok. Musren Bang Nas	1 Dok. Musren Bang Nas	100%
	Jumlah penyelenggaraan	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	15 Kab/kota	15 Kab/kota	15 Kab/kota	100%
	Jumlah Rapat Koordinasi	Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi Perencanaan	1 paket	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah dokumen KUA dan PPAS TA 2015	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2015	90 Dok. KUA	90 Dok. KUA	90 Dok. KUA	100%
			90 Dok. PPAS	90 Dok. PPAS	90 Dok. PPAS	
	Jumlah dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2014	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2014	90 Dok. KUA	90 Dok. KUA	90 Dok. KUA	100%
			90 Dok. PPAS	90 Dok. PPAS	90 Dok. PPAS	
	Jumlah dokumen Rancangan Akhir RPJMD	Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100%
Jumlah dokumen Perda RPJMD	Penetapan Perda RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	1 Perda RPJMD Prov Lpg	1 Perda RPJMD Prov Lpg	1 Perda RPJMD Prov Lpg	100%	
Jumlah dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	1 Dok. Renja	1 dok Renja	1 dok Renja	100 %	
		1 Dok. Renstra	1 Dok. Renstra	1 Dok. Renstra		
		1 Dok. RKT	1 Dok. RKT	1 Dok. RKT		
	Studi Administrasi Kota Baru (Lanjutan)	1 Paket	0 Paket (tidak dilanjutkan)	0 Paket (tidak dilanjutkan)	7,25%	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
	Jumlah Peserta Pembahasan	Pembahasan Prioritas dan Kegiatan serta Pra RKA SKPD Provinsi Lampung Tahun 2014	50 SKPD	50	SKPD	100%
	Jumlah hari Pameran & Pawai	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	12 hari pameran	12	hari pameran	100%
	Jumlah dok. Rancangan aplikasi e-planning	Pengembangan e-Planning	1 Dok.	1	Dok.	100%
	Dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah	Fasilitasi Tim Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Dok.	1	Dok.	100%

**9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis	Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang sosbud	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	15 Kab/kota	15	Kab/kota	100%
			30 SKPD	30	SKPD	
	Jumlah dokumen indikator pembangunan	Penyusunan Indikator Pembangunan Sosial Budaya	3 Dok.	3	Dok.	100%
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi RA-PPK	Koordinasi Fasilitasi dan Implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RA-PPK) Tahun 2014	4 SKPD 1 Dok.	4 1	SKPD Dok.	100%
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian target MDGs Provinsi Lampung	5 Kab/kota 1 Dok. monev	5 1	Kab/kota Dok. monev	100%
	Jumlah dokumen Siskurtanas	Koordinasi dan Updating Data Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas) Tahun	1 Dok. data Siskurtanas	1	dokumen data Siskurtanas	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan	%	
		2013				
	Jumlah koordinasi PPK	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung	15 Kab/kota	15 Kab/kota	100%	
	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Lampung	1 Dok. hasil koord. dan eval. keg.	1 Dok. hasil koord. dan eval. keg.	100%	

**10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan	%	
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor SDA dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung	1 Koordinasi	1 Dok. kelemb KPI	100%	
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan	Penunjang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung	1 Koordinasi	1 Dok. kelemb KPI	100%	
	Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung	14 Kab/kota	14 Kab/kota	100%	

**11. Program Penguatan Perekonomian Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Pembangunan Perdesaan telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		%
				Kegiatan		
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis	Jumlah dokumen indikator makro daerah Prov. Lampung	Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Daerah Provinsi Lampung	4 Dok. indikt makro ekon reg.	4 Dok. indikt makro ekon reg.		100%
	Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	15 Kab/kota	15 Kab/kota		100%
			10 pusat	10 pusat		
	Jumlah wilayah pemetaan	Pemetaan Potensi dan Pengembangan Cluster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	5 Kab.	5 Kab.		100%
	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan	Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	1 dok leaflet CSR	1 dok leaflet CSR		100%
			1 Dok. Buku Data-base CR	1 Dok. Buku Data-base CR		
	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah	1 forum	1 forum		100%
	Jumlah dokumen model ekonomi	Kajian Pengembangan dan Pilot Project Model Ekonomi Circle	1 Dok.	1 Dok.		100%
Jumlah dokumen kawasan wisata unggulan	Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Unggulan Tanjung Setia Pesisir Barat	1 Dok.	1 Dok.		100%	
		1 Dok.	1 Dok.			

**12. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan	%	
Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan	15 Kab/kota	15 Kab/kota	100%	
			4 pusat	4 pusat		
	Jumlah dokumen evaluasi	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok ev. Renja	1 Dok ev. Renja	100%	
			1 dok evaluasi Renstra	1 dok evaluasi Renstra		
			1 dok ev. RKPD	1 dok ev. RKPD		
			1 dok evaluasi RPJMD	1 dok evaluasi RPJMD		
	Jumlah dokumen memori AMJ	Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Gubernur Lampung 2010-2014	1 Dok.	1 Dok.	100%	
	Jumlah dokumen Monev dan rapat koordinasi	Peningkatan Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBN (DK/TP/UB) TA 2014	1 Dok. prog/keg APBN Prov. Lpg.	1 Dok. prog/keg APBN Prov. Lpg.	100%	
			4 Dok. Konso-lidasi managerial APBN	4 Dok. Konso-lidasi managerial APBN		
			1 Dok. Monev/Proseeding (48 kegiatan)	1 Dok. Monev/Proseeding (48 kegiatan)		
4 Kab/kota			4 Kab/kota			
4 pusat			4 pusat			

**13. Program Pemanjapan Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan Tol, KA, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Siger, Jalan dan Jembatan) telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah	15 Kab/kota 10 pusat	15 Kab/kota 10 pusat		100%
	Jumlah dokumen penetapan ruang jalan Prov. Lampung	Sinkronisasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Pusat Kegiatan Provinsi Lampung	1 Dok.	1 Dok		100%
	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan Wilayah dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Lampung	1 Dok. MP3EL	1 Dok. MP3EL		100%

**14. Program Penelitian dan Pengembangan telah terlaksana seluruh kegiatannya dengan capaian rata-rata 100%, rincian program dapat diuraikan sebagai berikut:**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan		%
Tersedianya hasil penelitian untuk mendukung perencanaan Pembangunan	Jumlah Pemenang lomba	Anugrah Inovasi Provinsi Lampung	9 Kel.	9 Kel.		100%
	Jumlah dokumen penguatan SIDA	Penguatan IPTEK dalam Mendukung Inovasi Daerah	1 Dok.	1 Dok.		100%
	Jumlah terbitan jurnal	Pembuatan/ Penyusunan Jurnal Inovasi dan Pembangunan Provinsi Lampung	3 terbitan jurnal	3 terbitan jurnal		100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN		
				Kegiatan	%	
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang litbang	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung	8 rapat	8 rapat	100%	
			3 Kab/kota	3 Kab/kota		
			5 pusat	5 pusat		
			2 Work-shop	2 Work-shop		
	Jumlah dokumen dan rapat	Pengelolaan Administrasi Dan Operasionalisasi Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung	3 rapat	3 rapat	100%	
			3 Dok.	3 Dok.		
	Jumlah dokumen riset	Penyusunan Riset Daerah Provinsi Lampung	1 Dok. Jakstrada IPTEK dan ARD 2015-2019	1 Dok. Jakstrada IPTEK dan ARD 2015-2019	100%	

### 2.1.3. Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2014 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2014 dapat di uraikan pada halaman berikut.

## 1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2014 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 14.858.600.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.818.317.477,00 atau 92,99%. Secara umum pelaksanaan serapan anggaran belanja langsung tercapai dengan kategori baik, namun terdapat 2 kegiatan yang serapan anggarannya masih rendah yaitu kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung hanya terserap 54,56% karena tidak terlaksananya pencairan honor-honor pegawai secara maksimal dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan ekonomi daerah yang hanya terserap 39,73% karena tidak memungkinkannya dilaksanakan koordinasi secara maksimal. Rinci serapan anggaran pada masing-masing program kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014**

	<i>URAIAN</i>	<i>PAGU (Rp)</i>	<i>REALISASI</i>	<i>(%)</i>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.807.600.000	1.690.530.497	95,73
	1. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	450.000.000	400.475.552	88,99
	2. Penyedia jasa administrasi keuangan	114.000.000	106.098.650	93,07
	3. Penyedia jasa kebersihan kantor	110.000.000	105.600.000	96,00
	4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	34.936.000	99,82
	5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600.000.000	552.175.045	92,03
	6. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	93.600.000	93.600.000	100,00
	7. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	155.000.000	151.590.000	97,80
	8. Penatausahaan aset daerah	50.000.000	47.219.000	94,44
	9. Dukungan operasional kantor bappeda	200.000.000	198.836.250	99,42

	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	(%)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.439.400.000	1.312.251.000	92,70
	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional	940.000.000	838.366.000	89,19
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	287.000.000	279.367.000	97,34
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	212.400.000	194.518.000	91,58
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000	59.400.000	99,00
	1. Pengadaan pakaian olah raga	60.000.000	59.400.000	99,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	173.985.000	86,99
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	75.560.000	75,56
	2. Peningkatan jasmani dan rohani pegawai	100.000.000	98.425.000	98,43
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	120.000.000	117.378.100	97,82
	1. Penyusunan laporan akhir kinerja pemerintah RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA	120.000.000	117.378.100	97,82
6.	Program Perencanaan Tata Ruang	882.750.000	825.049.310	90,11
	1. Fasilitasi program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)	127.376.000	126.408.600	99,24
	2. Penyusunan laporan penyelenggaraan penataan ruang	90.374.000	75.141.200	83,14
	3. Fasilitasi legalisasi perda tata ruang kab/kota	70.000.000	55.792.500	79,70
	4. Perencanaan model infrastruktur hijau di kota baru lampung	120.000.000	110.697.010	92,25
	5. Perencanaan detail kawasan destinasi wisata di pantai barat lampung	475.000.000	457.010.000	96,21
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	1.505.000.000	1.436.137.400	96,79
	1. Pembangunan database meta data spasial	150.000.000	147.958.000	98,64
	2. Pengembangan website bappeda provinsi lampung	150.000.000	149.196.600	99,46
	3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola data spasial	100.000.000	99.742.400	99,74
	4. Pembuatan peta tematik	150.000.000	146.746.700	97,83



	<i>URAIAN</i>	<i>PAGU (Rp)</i>	<i>REALISASI</i>	<i>(%)</i>
	5. Pembuatan peta administrasi lampung	290.000.000	286.418.800	98,77
	6. Pengembangan perpustakaan	100.000.000	97.826.000	97,83
	7. Penyusunan data pembangunan dan HSPK dan display data pembangunan	315.000.000	266.535.400	84,61
	8. Penyusunan bahan publikasi profil pembangunan provinsi lampung	150.000.000	142.343.500	94,90
	9. Pembuatan kalender dan buku agenda kegiatan	100.000.000	99.370.000	99,37
8.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.702.695.000</b>	<b>2.534.139.625</b>	<b>93,64</b>
	1. Forgab SKPD dan musrenbang provinsi	250.000.000	241.714.450	96,69
	2. Penyusunan RKPD 2014	125.000.000	114.399.300	91,52
	3. Musrenbangnas	150.000.000	149.991.100	99,99
	4. Pelaksanaan musrenbang kab/kota	100.000.000	99.657.475	99,66
	5. Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan (rakorpus)	75.000.000	74.322.900	99,10
	6. Penyusunan kebijakan KUA serta PPAS APBD tahun 2015	100.000.000	99.278.000	99,28
	7. Penyusunan KUA serta PPAS perubahan APBD tahun 2014	75.000.000	74.731.000	99,64
	8. Persiapan penyusunan RPJMD 2015-2019	350.000.000	318.349.500	90,96
	9. Penetapan perda RPJMD provinsi lampung 2015 – 2019	150.000.000	149.064.600	99,38
	10. Penyusunan dokumen perencanaan bappeda provinsi lampung	91.600.000	49.979.000	54,56
	11. Pembahasan prioritas dan kegiatan serta pra RKA SKPD tahun 2014	100.000.000	94.441.400	94,44
	12. Informasi perencanaan pembangunan terpadu (IPPT)	200.000.000	193.807.600	96,90
	13. Study sistem administrasi pemerintahan kota baru lampung	7.250.000	7.250.000	100,00
	14. Fasilitasi tim analisis kebijakan pembangunan daerah	578.845.000	578.153.500	99,88

	<i>URAIAN</i>	<i>PAGU (Rp)</i>	<i>REALISASI</i>	<i>(%)</i>
	15. Penyusunan database rencana kerja pemerintah daerah (RKPD Online)	350.000.000	288.999.800	82,57
9.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.365.000.000	1.230.650.700	91,51
	1. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang sosial budaya	325.000.000	311.848.000	95,95
	2. Penyusunan indikator pembangunan sosial budaya	150.000.000	142.053.300	94,70
	3. Koordinasi fasilitasi dan implementasi RA-PPK tahun 2014	125.000.000	112.707.000	90,17
	4. Pemantauan dan evaluasi pencapaian target MDG's Prov. Lampung	265.000.000	248.954.600	93,95
	5. Koordinasi dan uptading data sistem pengukuran ketahanan nasional (Siskurtanas) tahun 2013	100.000.000	81.310.600	81,31
	6. Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan provinsi lampung	300.000.000	246.608.900	82,20
	7. Pemantauan dan evaluasi RAD pangan dan gizi prov. Lampung	100.000.000	87.168.300	87,17
10.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	280.000.000	266.732.600	95,29
	1. Penguatan kelembagaan pengelolaan sektor SDA dan irigasi (WISMP II) prov. Lampung	110.000.000	105.071.500	95,52
	2. Penunjang penguatan kelembagaan pengelolaan sektor SDA dan irigasi (WISMP II) prov. Lampung	70.000.000	66.914.000	95,59
	3. Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Lampung	100.000.000	94.747.100	94,75
11.	Penguatan Perekonomian Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan	1.761.155.000	1.601.151.730	88,10
	1. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional	140.000.000	130.026.700	92,88

	<i>URAIAN</i>	<i>PAGU (Rp)</i>	<i>REALISASI</i>	<i>(%)</i>
	2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	300.000.000	280.869.280	93,62
	3. Pemetaan Potensi dan pengembangan Cluster Industri Baerbasis Ekonomi Lokal	200.000.000	191.054.000	95,53
	4. Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Lampung	200.000.000	192.582.300	96,2z9
	5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah	150.000.000	59.601.400	39,73
	6. Kajian Pengembangan dan Pilot Project Model Ekonomi	150.000.000	139.464.150	92,98
	7. Penyusunan Masterplan Kawasan Unggulan Tanjung Setia Pesisir Barat	100.000.000	95.481.600	95,48
	8. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Barat	521.155.000	512.072.300	98,26
12.	12. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	945.000.000	899.286.700	95,22
	1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan	200.000.000	182.878.500	91,44
	2. Evaluasi perencanaan pembangunan daerah	395.000.000	378.435.100	95,81
	3. Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Gubernur Lampung 2010 – 2014	150.000.000	147.923.500	98,62
	4. PePeningkatan pengendalian monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB) tahun 2014	200.000.000	190.049.600	95,02
13.	13. Pemantapan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Jalan Tol, KA, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Siger, jalan dan Jembatan)	525.000.000	450.563.815	81,32
	1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tata Ruang dan Praswil	275.000.000	256.288.315	93,20
	2. Sinkronisasi rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Pusat Kegiatan Se-Provinsi Lampung	150.000.000	130.548.700	87,03

	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	(%)
	3. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan Wilayah dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Lampung	100.000.000	63.726.800	63,73
14.	Penelitian dan Pengembangan	1.265.000.000	1.221.061.000	96,27
	1. Anugerah Inovasi provinsi Lampung	250.000.000	248.882.200	99,55
	2. Penguatan IPTEK dalam Mendukung Inovasi Daerah	190.000.000	161.330.100	84,91
	3. Pembuatan/Penyusunan Jurnal Inovasi dan Pembangunan provinsi Lampung	200.000.000	196.395.000	98,20
	4. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan pengembangan provinsi Lampung	200.000.000	197.213.700	98,61
	5. Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Pemerintah Prov. Lampung	225.000.000	220.445.000	97,98
	6. Penyusunan Riset Daerah provinsi Lampung	200.000.000	196.795.000	98,40
	<b>Jumlah</b>	<b>14.858.600.000</b>	<b>13.818.317.477</b>	<b>92,999</b>

## 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undang, pada Tahun Anggaran 2014 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.267.889.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 7.851.790.828,00 atau 84,72 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2014**

	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	(%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.267.889.000	7.851.790.828	84,72
<b>I</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>6.622.889.000</b>	<b>5.897.325.328</b>	<b>89,04</b>
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.750.948.800	4.408.902.900	92,80
2.	Tunjangan Keluarga	516.430.850	449.504.702	87,04

	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	(%)
3.	Tunjangan Jabatan	304.330.000	302.045.000	99,25
4.	Tunjangan Fungsional	50.400.000	35.000.000	69,44
5.	Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum	483.665.000	330.140.000	68,26
6.	Tunjangan Beras	385.954.920	284.899.840	73,82
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	129.594.595	86.748.596	66,94
8.	Pembulatan Gaji	1.564.835	84.290	-
<b>II</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>1.917.865.500</b>	<b>73,76</b>
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.600.000.000	1.917.865.500	73,76
<b>III</b>	<b>Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai</b>	<b>45.000.000</b>	<b>36.600.000</b>	<b>81,33</b>
1.	Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	45.000.000	36.600.000	81,33

### 2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung yang telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka beberapa permasalahan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan antara lain adalah:

1. Aspek Sumberdaya Manusia
  - a) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, sedangkan ASN Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya ASN Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II, serta petugas *outsourcing cleaning service* yang diberdayakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
  - b) ASN yang ada memiliki beragam latar belakang pendidikan baik pendidikan Sarjana maupun Magister, namun masih sangat sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan yang menjadi cabang ilmu utama dalam tugas-tugas Bappeda.

- c) Masih terdapat ASN yang belum disiplin dalam kehadiran dan pelaksanaan tugas-tugas.
- d) Padatnya tugas-tugas teknis yang harus diselesaikan oleh ASN Bappeda menyebabkan mereka kurang memiliki waktu untuk meningkatkan wawasan tentang peraturan tatacara penyusunan dokumen perencanaan yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, malah setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## 2. Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan

- a. ASN pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, terutama pejabat yang memiliki tugas menyusun perencanaan sebagai mitra Bappeda dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang tahapan dan tatacara dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
- b. Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya kurang mendapat perhatian.
- c. Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan sektor swasta sebagai mitra pemerintah belum optimal, seperti halnya dalam sinergi pelaksanaan CSR/PKBL antara swasta dan Pemprov Lampung.

## 3. Aspek Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Perencanaan

- a. Pada era perkembangan teknologi saat ini, Bappeda sebagai lembaga koordinasi belum sepenuhnya menggunakan system informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas. Seperti aplikasi dalam penyusunan perencanaan tahunan, pengumpulan data dan informasi dari SKPD dan kabupaten/kota, evaluasi pelaksanaan rencana, sinergi perencanaan dengan kabupaten/kota, dan sebagainya.

- b. Pengelolaan website Bappeda sebagai media untuk mempublikasikan kinerja dan hasil-hasil pelaksanaan tugas Bappeda, serta menjaring aspirasi dari masyarakat dirasakan belum optimal.
  - c. Kegiatan kompilasi dan publikasi data masih dilakukan oleh masing-masing Bidang, sehingga belum ada suatu output publikasi data yang terpadu dan menyeluruh, sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
  - d. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi pembangunan yang akurat dan akuntabel.
4. Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung
- a. Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera, dan lainnya sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang mendesak, maka sebagian pejabat dan staf Bappeda masih menggunakan laptop milik pribadi dan kekurangan peralatan kerja.
  - b. Terkait dengan kondisi peralatan yang ada, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan dan koneksitas data. Hal ini dapat dipahami mengingat penurunan kualitas dan ketersediaan peralatan yang ada akan mempengaruhi koneksitas antar bidang di dalam Bappeda sendiri maupun dengan SKPD lain.
  - c. Penurunan koneksitas dan jaringan data pada sisi lain juga mengakibatkan adanya data yang tidak *up to date*. Padahal data yang aktual sangat dibutuhkan, termasuk adanya data yang sangat dinamis dan harian, untuk proses perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung.
5. Aspek Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan
- a. Hingga saat ini mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung masih dilakukan secara manual, yang tentu saja prosesnya berjalan lambat dan kurang efektif.
  - b. Dokumen RPJMD Tahun 2015—2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat program-program

prioritas pembangunan hanya dari sumberdana APBD Provinsi Lampung, sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal kenyataannya pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari dana APBD Provinsi saja, tetapi juga dari dana APBN dan investasi swasta. Maka untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung perlu disusun dokumen-dokumen perencanaan yang mendukung atau melengkapi RPJMD.

- c. Masih adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen anggaran (KUA/PPAS dan APBD).
  - d. Masih terbatasnya kajian strategis, analisis dan studi lapangan yang terkini dalam mendukung proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan daerah.
6. Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan
- a. Sebagai konsekuensi dari tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka Bappeda sebagai staf Gubernur memiliki tugas dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota, serta sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan pelaporan berbagai rencana aksi daerah yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.
  - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagai bahan referensi (*feedback*) dalam proses perencanaan



### **BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung**

Dengan memperhatikan visi, misi, agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan sasaran utama pembangunan nasional, serta amanat yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung 2015-2019 dapat diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET (2019)
1.	Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.	a. Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun	Persen	100
		b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persen	100
2.	Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.	a. Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD.	Persen	100
		b. Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD.	Persen	100
		Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	Persen	100
4.	Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan.	Persen	100

5.	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	Persen	100
----	---	--	--------	-----

Secara lebih rinci target kinerja yang akan dicapai dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 tersebut dapat disajikan dalam matrik pada halaman berikut.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019**

NO	TUJUAN	TARGET KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.	100%	a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	a. Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun	90 %	92,5 %	95 %	97,5 %	100 %
			b. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
2.	Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.	100%	a. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	a. Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD.	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	b. Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD.	90%	95%	100%	100%	100%
				Kesesuaian antara Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Provinsi Lampung.	90%	95%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis	100%	Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90%	95%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	TARGET KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.						
4.	Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.	100%	Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	70%	80%	90%	100%	100%
5.	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.	100%	Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	20%	50%	75%	100%	100%

Dalam penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, telah disusun program kerja dan indikator kinerja yang akan menjadi tolok ukur capaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Meningkatnya disiplin aparatur.
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur.
5.	Program Pengembangan Data dan Informasi.	jumlah dokumen/publikasi mengenai data dan informasi yang mendukung proses perencanaan.
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dihasilkan dan disahkan.
7.	Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan.	Jumlah pertemuan, koordinasi yang dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, SKPD terkait serta <i>stakeholders</i> ..
8.	Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah.	Jumlah dokumen analisis kebijakan yang melengkapi perencanaan pembangunan daerah.
9.	Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Persentase program/kegiatan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi.
10.	Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

### 3.2. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016

Berpedoman pada sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka Bappeda Provinsi Lampung merumuskan beberapa Program Kerja Tahun 2016 seperti tabel pada halaman berikut:

Tabel 3.4. Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2016

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</li> <li>2. Penyajian jasa administrasi keuangan</li> <li>3. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>4. Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran</li> <li>6. Penyediaan Jasa Keamanan</li> <li>7. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD</li> <li>8. Penatausahaan Aset Daerah</li> <li>9. Dukungan Operasional Kantor Bappeda</li> <li>10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>11. Penyediaan ATK</li> <li>12. Penyediaan Cetak dan Penggandaan</li> <li>13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor</li> <li>14. Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor</li> <li>2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> </ol>

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		4. Peningkatan fasilitas gedung kantor
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1. Pengadaan Pakaian Dinas
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1. Pembinaan SDM Aparatur
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	1. Pengelolaan Meta data Spasial 2. Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional 4. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 5. Padu serasi Informasi Geospasial Batas Wilayah Provinsi Lampung 6. Penyusunan data indikator kinerja Pemerintah Daerah 7. Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung 8. Sistem pengukuran ketahanan Nasional (siskustanas) 9. Koordinasi data dan informasi pembangunan daerah 10. Penyusunan data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>	1. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi 2. Penyusunan RKPD 2017 3. Fasilitasi untuk mengikuti rangkaian acara Musrenbang Nasional 4. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota 5. Analisis perencanaan pembangunan

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		Daerah 6. Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD Perubahan TA. 2015 - 2016) 7. Workshop perencanaan pembangunan Daerah 8. Pengembangan sistem perencanaan online 9. Pembinaan penyusunan RKPD Kab/Kota 10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan 11. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT) 12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
<b>8</b>	<b>Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan</b>	1. Koordinasi perencanaan pengembangan Ekonomi Daerah 2. Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah 3. Sinergi dan integrasi potensi CSR dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung 4. Koordinasi perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan 5. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra 6. Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok 7. Pembinaan dan admistrasi proyek (PAP) program penanggulangan kemiskinan 8. Fasilitasi sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung 9. Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & LH 10. Koordinasi Rencana Aksi Daerah



<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		<p>tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung</li> <li>12. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung</li> <li>13. Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman</li> <li>14. Fasilitasi pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur</li> <li>15. Koordinasi monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian</li> <li>16. Fasilitasi dan koordinasi badan koordinasi daerah (BKPRD)</li> </ol>
9	<b>Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah</li> <li>2. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata</li> <li>3. Fasilitasi dan Koordinasi Kedaulatan Pangan dan Peralihan Kewenangan Bidang Energi dan Kemaritiman</li> <li>4. Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016</li> <li>5. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah</li> <li>6. Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan</li> <li>7. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ol>

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
10	<b>Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan.</li> <li>9. Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung</li> <li>1. Evaluasi hasil pencapaian renstra &amp; renja Bappeda</li> <li>2. Penyusunan laporan kinerja Bappeda</li> <li>3. Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Target SDGS</li> <li>4. Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian</li> <li>5. Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>6. Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019</li> <li>7. Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi</li> <li>8. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>9. Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung</li> <li>10. Fasilitasi dan pembinaan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota</li> <li>11. Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB )TA. 2016</li> <li>12. Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD Ta. 2016</li> </ul>
11	<b>Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelarasan RPJMN Integrasi UU 23 Tahun 2014 kedalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-</li> </ul>

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		2019 2. Penyusunan kajian pendapatan daerah terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 3. Penyusunan studi lanjutan proyek infrastruktur untuk kerjasama Pemerintah dan swasta 4. Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs) 6. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019 7. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kebudayaan Lampung 8. Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung 9. Penyusunan neraca sumber daya lahan daerah Provinsi Lampung 10. Penyusunan dan legalisasi RTRW dan rencana rinci tata ruang wilayah (RTRKS/RTDR/KSCT) Provinsi Lampung

Jika mengacu kepada dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, pagu anggaran Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar Rp. 15.300.000.000 namun terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 600.000.000.

## ***BAB IV. PENUTUP***

---

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 yang dijabarkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan Pusat dan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, diharapkan tercapai kualitas produk perencanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok Bappeda Provinsi Lampung, Tercapainya sistem prosedur penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif dan Tercapainya sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Lampung yang profesional dengan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun.

Sesuai dengan rumusan Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, terdapat 11 Program Kerja Bappeda Provinsi Lampung dengan jumlah fasilitasi anggaran sebesar Rp. 14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah). Perkiraan maju Tahun 2017 memiliki jumlah program sebanyak 11 Program Kerja dengan jumlah fasilitasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).

Demikian Dokumen Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.

# LAMPIRAN

**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
PROVINSI LAMPUNG**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1.902.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Rutin</b>	<b>100%</b>	<b>2.285.000.000</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tingkat layanan telepon, internet, air dan listrik	Provinsi Lampung	100%	500.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	575.000.000
	2 Penyajian jasa administrasi keuangan	Tingkat layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	100%	143.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	160.000.000
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tingkat layanan kebersihan kantor	Provinsi Lampung	100%	120.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	150.000.000
	4 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Lampung	100%	50.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	70.000.000
	5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	Provinsi Lampung	9 orang	150.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	10 orang	170.000.000
	6 Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah penyediaan jasa keamanan	Provinsi Lampung	5 orang	76.500.000	APBD	Kegiatan Rutin	6 orang	140.000.000
	7 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen peningkatan layanan pengelolaan keuangan	Provinsi Lampung	20 Dok	159.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	20 Dok	130.000.000
	8 Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah dokumen aset	Provinsi Lampung	2 Dok	38.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	2 Dok	70.000.000
	9 Penyediaan ATK	Jumlah ATK	Provinsi Lampung	12 Bulan	34.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	50.000.000
	10 Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Provinsi Lampung	100%	21.500.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	30.000.000
	11 Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minuman	Provinsi Lampung	10 Bulan	10.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	25.000.000
	12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan alat rumah tangga dan kebersihan	Provinsi Lampung	12 Bulan	25.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	25.000.000
	13 Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor	Tingkat layanan perbaikan alat kerja	Provinsi Lampung	12 Bulan	50.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	90%	60.000.000
	14 Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Provinsi Lampung	4 kali	525.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	4 kali	630.000.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>95%</b>	<b>770.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Rutin dan Lanjutan</b>	<b>95%</b>	<b>1.000.000.000</b>
	1 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana	Provinsi Lampung	95%	190.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	90%	200.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Provinsi Lampung	1 Paket	80.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Paket	150.000.000
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Provinsi Lampung	21 Unit	360.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	20 Unit	450.000.000
	4 Peningkatan fasilitas gedung kantor	Jumlah paket pembangunan fasilitas gedung kantor.	Provinsi Lampung	1 Paket	140.000.000	APBD	Kegiatan baru	1 Paket	200.000.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>96%</b>	<b>102.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegitan Rutin</b>	<b>97%</b>	<b>165.000.000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Provinsi Lampung	160 stel	52.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	160 stel	90.000.000
	2 Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah dokumen evaluasi pengembangan budaya kerja	Provinsi Lampung	1 Dok	50.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Dok	75.000.000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>235.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegitan Rutin</b>	<b>100%</b>	<b>338.000.000</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	50 orang	95.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100 orang	165.000.000
	2 Pembinaan SDM Aparatur	Jumlah pembinaan SDM aparatur	Provinsi Lampung	80 kali	140.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	80 kali	173.000.000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegitan Rutin</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
	1 Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Lampung		100.000.000	APBD	Kegiatan Rutin		-
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1.454.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Rutin, Bari dan Lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>2.125.000.000</b>
	1 Pengelolaan Meta data Spasial	Jumlah database Pengelolaan Meta data spasial	Provinsi Lampung	1 sistem informasi	200.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 sistem informasi	250.000.000
	2 Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Persentase Updating Web Site, Perpustakaan dan data spasial lainnya	Provinsi Lampung	100%	129.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	250.000.000
	3 Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Persentase Kelancaran Arus Data pada Jaringan Data Spasial Nasional	Provinsi Lampung	100%	150.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	250.000.000
	4 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Provinsi Lampung	Persentase jumlah fasilitasi dan pengelolaan datas spasial	Provinsi Lampung	100%	200.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	250.000.000
	5 Padu serasi Informasi Geospasial Provinsi Lampung	Pelatihan Pembuatan Peta Tematik dan Updating Album Peta Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	15 Kab/Kota, 30 Peta Tematik	200.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	100%	250.000.000
	6 Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah buku data indikator kinerja pemerintah, Buku Lampung Dalam Angka Tahun 2015, Forum Data	Provinsi Lampung	75 buku DIKP, 25 Buku LDA	260.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	75 buku DIKP, 25 Buku LDA	400.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
7	Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Jumlah media publikasi data dan informasi Pembangunan Provinsi Lampung secara berkala	Provinsi Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku Profil Lampung	65.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Panel display data, 100 buku saku Profil Lampung	125.000.000
8	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskustanas)	Input data siskustanas	Provinsi Lampung	1 Dok (8 gatra)	50.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Dok (8 gatra)	75.000.000
9	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Keterisian Data Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Dok	150.000.000
10	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	120 Buku	100.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Buku	125.000.000
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>97%</b>	<b>2.326.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Rutin, Bari dan Lanjutan</b>	<b>97%</b>	<b>2.465.000.000</b>
1	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Provinsi Lampung	2 kali	520.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	2 kali	350.000.000
2	Penyusunan RKPD 2016	Terlaksananya orientasi Tim RKPD, Tersedianya dokumen RKPD dan RKPD-P, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017	Provinsi Lampung	75 eks	181.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	75 eks	225.000.000
3	Koordinasi kegiatan Musrenbang Nasional	diikutinya rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional	Provinsi Lampung	5 kali	140.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	5 kali	225.000.000
4	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Provinsi Lampung	15 Kab/Kota	112.500.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	15 Kab/Kota	125.000.000
5	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan dan ketimpangan wilayah	Provinsi Lampung	1 Dok	209.000.000	APBD	Kegiatan Baru	1 Dok	85.000.000
6	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS APBD P 2015 - 2016)	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD-P 2015-2016)	Provinsi Lampung	200 eks	297.500.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	200 eks	325.000.000
7	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya workshop penyusunan Renja SKPD Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	55 SKPD	200.000.000	APBD	Kegiatan Baru	55 SKPD	275.000.000
8	Pengembangan sistem perencanaan online	Penambahan Modul dan Maintenance	Provinsi Lampung	1 Paket	285.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	150.000.000
9	Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota	terlaksananya pembinaan penyusunan RKPD Kab/Kota	Provinsi Lampung	15 Kab/Kota	70.000.000	APBD	Kegiatan Baru	15 Kab/Kota	80.000.000
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Bappeda	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan	Provinsi Lampung	5 kali	50.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	5 kali	175.000.000
11	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Provinsi Lampung	1 kali	200.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 kali	300.000.000
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	3 Dok : LPPD, LAKIP, RENSTRA	61.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	3 Dok : LPPD, LAKIP, RENSTRA	150.000.000



No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
8	<b>Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>2.035.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Baru dan Lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>2.955.000.000</b>
	1 Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung	Jumlah pelaksanaan Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah	Provinsi Lampung	80 kali	300.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	80 kali	300.000.000
	2 Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Jumlah keikutsertaan pada pameran peluang investasi	Provinsi Lampung	2 kali	225.000.000	APBD	Kegiatan Baru	2 kali	250.000.000
	4 Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pendanaan dan pembiayaan	Provinsi Lampung	15 Kali	160.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	18 kali	250.000.000
	5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra	Provinsi Lampung	11 kali Kab/Kota 4 kali Pusat	275.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	80 kali	350.000.000
	6 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan dana pajak Rokok	Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Provinsi Lampung	15 kab/ kota	75.000.000	APBD	Kegiatan Baru	0	100000000
	7 Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Program Penanggulangan Kemiskinan	Provinsi Lampung	1 Dok	-	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
	8 Koordinasi Program Penganggulan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Tercapainya perencanaan dan koordinasi penganggulan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	150.000.000	APBD	Kegiatan Baru	1 Dok	150.000.000
	9 Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & SDA LH	Jumlah Dokumen laporan koordinasi perencanaan praswil, tata ruang dan LH	Provinsi Lampung	80 kali	250.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	80 kali	400.000.000
	10 Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca danantisipasi dampak perubahan iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)	Jumlah Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan tentang penurunan emisi gas rumah kaca	Provinsi Lampung	1 Dok	75.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	150.000.000
	11 Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Pendukung Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	50.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	80.000.000
	12 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung	Jumlah Lembaga Pengelolaan Irigasi yang Mandiri melalui WISMP, PISP	Provinsi Lampung	1 Dok	150.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	250.000.000
	13 Koordinasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman	Jumlah Koordinasi dalam penguatan kelembagaan Pokja AMPL dan Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal Perumahan serta Pemukiman	Provinsi Lampung	100%	50.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	100%	125.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
14	Koordinasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan Pelaksanaan Program Unggulan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi Lampung	1 dok	50.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
15	Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian	Jumlah koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi yang dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah	Provinsi Lampung	15 kali	100.000.000	APBD	Kegiatan Baru	15 kali	100.000.000
16	koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Koordinasi dalam Penguatan Kelembagaan BKPRD dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	20 Kali 1 Lap	125.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	20 Kali 1 Lap	250.000.000
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>3.133.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Baru dan Lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>1.100.000.000</b>
1	Akselerasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah Gathering dengan dunia usaha	Provinsi Lampung	2 kali	138.000.000	APBD	Kegiatan baru	2 kali	125.000.000
2	Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	Jumlah Fasilitasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata	Provinsi Lampung	10 kali	200.000.000	APBD	Kegiatan baru	10 kali	200.000.000
3	Koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	jumlah koordinasi peralihan kewenangan bidang kemaritiman	Provinsi Lampung	10 kali	200.000.000	APBD	Kegiatan baru	10 kali	300.000.000
4	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016	Jumlah rapat koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2016	Provinsi Lampung	1 kali	2.000.000.000	APBD	Kegiatan baru	0	0
6	koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi	jumlah koordinasi pembangunan mendukung kedaulatan pangan	Provinsi Lampung	10 kali	125.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	10 kali	125.000.000
7	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Lampung	2 Dok	115.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	2 Dok	150.000.000
8	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	155.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	6 Dok	200.000.000
9	Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan	Terkoordinasinya pemanfaatan anggaran DBHCHT dan tersedianya dokumen kajian pengembangan tembakau rendah nikotin	Provinsi Lampung	14 kab/kota, 1 dokumen	200.000.000	APBD	Kegiatan baru	0	-
<b>10</b>	<b>Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1.043.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Baru dan Lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>1.735.000.000</b>
1	Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Pencapaian Renstra SKPD Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	10 eks	75.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	10 eks	175.000.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Jumlah dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) Tahun	Provinsi Lampung	3 dok	75.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	3 dok	175.000.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3	Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Target SDGS	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan Evaluasi pencapaian target SDGS	Provinsi Lampung	0	-	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	150.000.000
4	Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian	Jumlah laporan pencapaian target pasca MDGs	Provinsi Lampung	1 Dok	150.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	0	0
5	Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah dokumen laporan percepatan pembangunan daerah tertinggal	Provinsi Lampung	1 Dok	-	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
6	Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Jumlah dokumen laporan pencapaian RAD pangan dan gizi 2015-2019	Provinsi Lampung	0	0	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
7	Koordinasi dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan pencegahan korupsidan reformasi birokrasi	Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
8	Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan	Provinsi Lampung	20 eks	-	APBD	Kegiatan Lanjutan	20 eks	125.000.000
9	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov. Lampung	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan SKPD Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 dok	210.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 dok	200.000.000
10	Pembinaan dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan penilaian APN	Provinsi Lampung	15 Kab/kota	150.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 dok	175.000.000
11	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/TA. 2016	Persentase program dan kegiatan APBN (DK/TP/UB) yang dimonitoring dan evaluasi.	Provinsi Lampung	5%	150.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	5%	250.000.000
12	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016	Persentase program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan evaluasi, matrik persandingan APBN dan APBD.	Provinsi Lampung	5% dan 2 bk	133.000.000	APBD	Kegiatan Baru	5% dan 2 bk	185.000.000
<b>11</b>	<b>Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>Kegiatan Baru dan Lanjutan</b>	<b>100%</b>	<b>1.332.000.000</b>
1	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019	Dokumen Revisi Perda RPJMD	Provinsi Lampung	100%	200.000.000	APBD	Kegiatan Baru	0	0
3	Penyusunan Studi Lanjutan Proyek Infrastruktur Untuk kerjasama Pemerintah dan Swasta	Jumlah dokumen studi pendahuluan proyek infrastruktur untuk kerjasama pemerintah dan swasta	Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	100.000.000
4	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian rencana kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Provinsi Lampung	1 paket	100.000.000	APBD	Kegiatan Baru	1 Paket	132.000.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)	Jumlah dokumen perencanaan pasca MDGs (SDGs)	Provinsi Lampung	1 Dok	200.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	0	0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/ baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi (Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
6	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Jumlah dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019	Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	0	0
7	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kebudayaan Lampung	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kebudayaan Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	-	APBD	Kegiatan Lanjutan	0	150.000.000
8	Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung	Tersusunnya grand design kependudukan Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	1 Dok	150.000.000	APBD	Kegiatan Baru	0	200.000.000
9	Penyusunan Neraca Sumber Daya Lahan Daerah Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Neraca SDA	Provinsi Lampung	0,00	-	APBD	Kegiatan Baru	0	0
10	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen dan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung.	Provinsi Lampung	1 Dok	750.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	1 Dok	750.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>14.700.000.000</b>				<b>15.500.000.000</b>

Bandar Lampung,

2015



**Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM, MEP**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601009 198603 1 011